

REORIENTATION THE ISLAMIC EDUCATION SYSTEM IN ISLAMIC BOARDING SCHOOL; STUDY OF THE IMPLEMENTATION OF INCLUSIVE VALUE IN *SALAFI* AND *KHALAFI* ISLAMIC BOARDING SCHOOL IN MADURA

Maryam Qadarin¹

Ahmad Fauzi²

¹ Sharia Economics, Islamic Economics and Business, IAI Nazhatut Thullab, Indonesia

² Educational Management Tarbiyah and Teachery, UIN Sunan Ampel, Indonesia

¹ maryamqadarin@gmail.com

² ahmad.fauzi@uinsby.ac.id

Abstract

Islamic boarding school education system has been more oriented toward the attainment of worship ability and understanding of tauhid with singular dogma, so santri as the output of Islamic boarding school with an exclusive nuance. This condition will be a big problem when Islamic boarding school and *Kiai* are role model in all aspects of society's life as in Madura. So that exclusive education system that brought by *Kiai* and they Islamic boarding school become a qibla for cultural development and the intellectual of Madura society that far from moderation and tolerance. The aim of this study are for measuring the implementation of inclusive Islamic education system in *salafi* and *khalafi* Islamic boarding school in Madura in for indicators: tolerance, equality, *tawazun*, and *musyawarah*. The result of the first aim will be the key to formulate the strategic way for reorientating the inclusive Islamic education system. This study used quantitative and qualitative method. The result of this study are, **first** the the implementation of inclusive Islamic education system for indicator tolerance is in quite good category in *salafi* and in good one in *khalafi*. The indicator equality, *tawazun* are in good category for both. The *musyawarah* showed in quite good category in *salafi* and in good one in *khalafi*. **Second**, There are three strategic way for reorientating the inclusive Islamic education system. 1. Teacher should have ability to apply inclusive value, 2. Curriculum should consist of inclusive value for muslim and others religion. 3. using 3 of moderation such moderation of thought, movement and action.

Keywords : inclusive, tolerance, reorientation Islamic education system

Pendahuluan

Kajian tentang pesantren menjadi kajian yang selalu menarik untuk dibahas dari beragam sisi, baik sisi historis, sosiologis ataupun sistem pengembangannya sebagai lembaga pendidikan

agama. Secara historis pesantren memiliki peran serta andil yang cukup besar pada aspek kultural dan intelektual Nusantara. Dalam ranah intelektualitas, pesantren telah menjelma menjadi salah satu lembaga pendidikan tertua di Nusantara yang tetap bertahan hingga saat ini. Disebut tertua sebab pesantren sendiri lahir bersama dengan kehadiran awal Islam dan beriring sepanjang proses islamisasi di Nusantara berlangsung.

Berkaitan dengan konteks sosiologis, peran pesantren juga tak kalah besarnya. Pesantren merupakan agen transformasi budaya yang seringkali menjadi mediator penyeimbang dan perubahan dalam dinamisasi masyarakat. Peran ini telah melekat dan menyatu dalam tubuh pesantren bersamaan dengan awal kelahiran dan proses tumbuhnya pesantren di Nusantara. Pada era penjajahan Belanda misalnya, pesantren tak hanya menjadi tameng masyarakat yang secara fisik berada di garda terdepan melawan kolonialisasi, namun juga memposisikan dirinya secara kultural sebagai filter bagi seluruh internalisasi budaya luar.

Namun, ditengah segala nilai lebih pesantren yang demikian, rupanya pesantren memiliki beberapa aspek kelemahan yang patut untuk disadari dan dikritisi sebagai bahan pengembangan. Salah satu kelemahan tersebut terletak pada aspek sistem dan kurikulum pendidikan pesantren. Pesantren pada kenyataannya secara umum lebih memprioritaskan orientasi pendidikannya pada pemahaman dan pencapaian aspek ibadah praktis dari pada nilai filosofi pendidikan. Senada dengan hal tersebut, Abdul Munir Mul Khan menyebutkan bahwa disadari atau tidak, sistem pendidikan pesantren selama ini lebih terorientasi pada pencapaian kemampuan aspek ritualitas ibadah dan pemahaman tauhid saja dengan dogma yang bersifat tunggal.¹ Akibatnya, barometer tingkat pemahaman keagamaan di dunia pesantren lebih diartikulasikan pada hal-hal yang bersifat lahiriyah dengan nuansa eksklusif, dari pada batiniyah dengan nuansa inklusif.

Jika hal ini terus terjadi, tentu tidak akan berdampak baik terhadap masa depan pesantren. Dalam skala yang lebih besar, santri/*output* pesantren pada akhirnya bisa saja akan berhasil menjalankan perannya sebagai agamawan, namun gagal menjalankan fungsinya secara sosiologis sebagai agen transformasi budaya yang mengusung nilai-nilai moderasi dan toleransi. Mengapa? Sebab prioritas pemahaman keagamaan santri telah terbiasa untuk berkiblat hanya kepada ibadah praktis yang bersifat eksklusif dan dogmatik. Sedangkan nilai-nilai normatif moral dan filosofi pendidikan, hanya menjadi narasi tekstual yang tidak tersentuh.

¹ Abdul Munir Mul Khan, "Humanisasi Pendidikan Islam", *Tashwirul Afkar, Jurnal Refleksi Pemikiran Keagamaan dan Kebudayaan*, No. 11 (2001).

Indikasi tersebut sebenarnya telah muncul belakangan ini ketika kita dihadapkan pada kenyataan bahwa beberapa pesantren gagap untuk mengambil peran di tengah masyarakat yang sarat konflik. Di Madura misalnya, beberapa pesantren tidak hanya gagal menempatkan posisinya sebagai alat transformasi budaya dan mediator penyeimbang masyarakat, bahkan beberapa pesantren turut andil untuk memunculkan konflik-konflik radikal dalam kehidupan masyarakat. Contoh yang lebih spesifik dan riil misalnya mengenai konflik *Sunni-Syiah* di kecamatan Omben, Sampang. Bahwa apapun latar belakang konteks pencetusnya, namun konflik tersebut jika dirunut sejatinya berakar dari lingkup pesantren yang diwakili oleh tokoh bernama Roisul Hukama dan Tajul Muluk.

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti meyakini bahwa telah tiba waktu bagi pesantren untuk bersedia melakukan reorientasi sekaligus rekonstruksi terhadap sistem pendidikan agama yang selama ini telah berjalan dalam dunia pendidikan pesantren. Civitas pesantren harus mulai memahami bahwa orientasi pendidikan keagamaan tidak hanya harus terfokus pada kemampuan memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai praktis, namun jauh lebih penting adalah pemberian prioritas pada kemampuan pemahaman serta implementasi terhadap nilai-nilai moral dan filosofis pendidikan.

Salah satu nilai yang penting untuk dikaji adalah nilai-nilai inklusif dalam Islam. Penulis menilai, bahwa nilai inklusif layak menjadi poin prioritas dalam usaha reorientasi sistem pendidikan keagamaan pesantren.

Inklusif dapat diartikan sebagai sikap keterbukaan menerima perbedaan baik dalam kultur maupun keyakinan, serta kemauan bersikap toleran, adil dan moderat sehingga tercipta keharmonisan antar manusia.²

Unsur-unsur nilai inklusif yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai: toleransi, kesetaraan, keseimbangan serta musyawarah. Secara normatif, nilai-nilai dari pada unsur inklusif ini digali dari sumber primer Islam, yaitu al-Qur'an dan Hadis.

Penelitian pada dua tipologi pesantren di Madura, yaitu pesantren *khalafi* dan pesantren *salafi*³. Dari keduanya, akan dibandingkan kualitas implementasi nilai-nilai inklusif dari masing-masing pesantren. Alasan dari pengambilan sampel dari dua tipologi pesantren di Madura sebagai obyek penelitian adalah: *Pertama*, karena kedua tipe pesantren tersebut memiliki

² Anwari Nuril Huda, "Pendidikan Inklusif dari Pesantren", *Jurnal Idrak*, Vol. 1, No. 1 (2018), 39.

³ Khosin, *Tipologi Pondok Pesantren*, (Jakarta: Diva Pustaka, 2006), 101.

karakteristik sistem pendidikan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Sehingga diharapkan dengan mengetahui lebih dalam mengenai kualitas implementasi nilai-nilai inklusif dalam kedua sistem yang berbeda tersebut, maka akan memudahkan peneliti untuk merumuskan reorientasi sistem pendidikan agama yang cocok bagi masing-masing tipe pesantren. *Kedua*, karena Madura secara sosiologis sejatinya adalah salah satu basis kultural masyarakat Islam di Indonesia yang memiliki kuantitas pesantren cukup besar. Jumlah pesantren di Madura yang terdaftar di Kementerian Agama adalah 861.⁴ Jumlah tersebut belum termasuk pesantren-pesantren *salafi* yang tidak terdaftar dalam data Kementerian Agama dan berdiri secara independen sebagai lembaga pendidikan tradisional.

Oleh karena itu, maka penelitian mengenai reorientasi sistem pendidikan agama di pesantren *salafi* dan *khalafi* di Madura ini memiliki urgensi yang strategis dan diharapkan dapat menjadi acuan bagi proses reorientasi dan pengembangan pesantren secara luas di daerah yang lain.

Tinjauan Pustaka

Pembahasan mengenai pendidikan inklusif ini sebenarnya telah beberapa kali dibahas dalam kajian-kajian yang beragam. Namun tentu kajian-kajian tersebut memiliki titik tekan yang berbeda dengan kajian dalam penelitian ini.

Salah satunya adalah tulisan milik Syamsul Huda Rohmadi yang berjudul “*Pendidikan Islam Inklusif Pesantren (Kajian Historis-Sosiologis di Indonesia)*”. Tulisan ini adalah hasil penelitian yang dimuat di jurnal *Fikrotuna* Vol. 5, No. 1, Juli, 2017. Dalam penelitian ini, penulis menguraikan bahwa pesantren telah mengalami rotasi perubahan dan perkembangan yang cepat sejak awal kelahirannya hingga saat ini. Pesantren yang awalnya berfungsi sebagai lembaga pendidikan keagamaan, telah bertransformasi menjadi lembaga yang turut berperan besar dalam sosial kemasyarakatan. Untuk menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan dan sekaligus sebagai lembaga sosial masyarakat, beberapa pesantren ada yang tetap menjaga kemurnian tradisinya sebagai pusat pengajaran keilmuan keagamaan saja. Namun ada juga pesantren yang memutuskan untuk secara riil terjun dibidang ekonomi kemasyarakatan dengan tetap menjaga ciri khasnya sebagai lembaga pendidikan agama. Hasil penelitian ini bermuara pada gagasan

⁴ <https://ditpdpontren.kemenag.go.id/pdpp/statistik?id=35>. Diakses tanggal 09 Agustus 2022.

agar pesantren selanjutnya terus tumbuh mengikuti tuntutan perkembangan dan transformasi sosial, tanpa harus terlepas dari akar tradisi khasnya.

Tulisan selanjutnya adalah "*Habitulasi Nilai-Nilai Inklusif di Pesantren Ma'haduttholabah dan Darul Khair Babakan Tegal*". Penelitian ini adalah milik M. Misbah yang di muat di jurnal al-Qalam vol. 25 No. 1, tahun 2019. Penulis menyatakan bahwa penelitian ini bertujuan untuk menjadi antitesa bagi stigma negatif yang muncul terhadap pesantren yang mengatakan bahwa pesantren adalah lembaga pendidikan yang secara sosial sudah jauh keluar dari misi awalnya. Stigma negatif tersebut menurut penulis terlanjur muncul dalam paradigma masyarakat pasca kejadian bom Bali 1 yang menguraikan kenyataan bahwa hampir seluruh pelakunya berasal dari civitas pesantren. Namun pada kenyataannya, hasil penelitian ini memaparkan bahwa kedua pesantren yang menjadi obyek penelitian ini menunjukkan bahwa pengasuh dari kedua pesantren tersebut memiliki cara pandang yang sangat inklusif dan moderat. Kedua pengasuh pesantren tersebut sama-sama memandang Islam sebagai agama perdamaian yang menjunjung kasih sayang dan toleransi. Nilai-nilai inklusif yang diimplementasikan dalam kedua pesantren ini adalah: *tawassut, i'tidal tawazun, tasamuh dan tasyawur*. Sistem habituasi yang digunakan di kedua pesantren ini adalah strategi pendidikan seperti keteladanan, *reward, punishment*, habituasi keseharian, praktik dan sebagainya. Sumber-sumber referensi dari kedua pesantren ini berasal dari kitab-kitab kuning semacam *Ta'lim al-Muta'allim, Akhlaq li al-Banin, Barzanji, Wasaya* dan sebagainya. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode *unstructured deep interview*, pengamatan terlibat yang moderat, dokumentasi dan teori analisa data.

Berdasarkan seluruh pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian di atas tidak memiliki kesamaan dengan penelitian ini, baik secara substantif maupun metodologis. Artinya, penelitian tentang pesantren inklusif sejatinya bukan penelitian yang benar-benar baru. Hanya saja, setiap penelitian yang dilakukan oleh para peneliti mengenai hal tersebut memiliki karakteristik, *stressing* dan cara pandang yang berbeda.

Landasan Teori

Berikut akan dijelaskan berbagai teori yang melandasi penelitian ini

1. Reorientasi

Kata reorientasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah peninjauan kembali wawasan untuk menentukan sikap dan lain sebagainya.⁵ Berkaitan dengan reorientasi sistem pendidikan agama di pesantren hal tersebut memiliki makna sebagai usaha untuk menilik kembali terhadap sistem pendidikan agama yang sudah berjalan, untuk kemudian menentukan arah dan tujuan baru terhadap sistem pendidikan tersebut.

2. Sistem Pendidikan Agama

Sistem merupakan istilah yang berasal dari bahasa Yunani yaitu *sistema* yang artinya sehimpunan unsur-unsur yang saling terhubung dan bekerja sama satu sama lain, sehingga yang dimaksud dengan sistem pendidikan adalah kumpulan unsur-unsur pendidikan yang saling terhubung dan bekerja sama untuk mencapai visi pendidikan. Adapun unsur yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- Pelaku kegiatan pendidikan di pesantren yaitu pengasuh atau biasa disebut kiai, guru atau dewan pengajar, pengurus serta santri.
- Sarana *software* pesantren meliputi kurikulum, perpustakaan, peraturan pesantren, sistem pengajaran, keterampilan dan lain sebagainya.⁶

3. Pesantren

Sedangkan secara terminologi atau istilah, kata pesantren menurut M. Arifin berarti adalah lembaga intelektual yang sepenuhnya berada dibawah kepemimpinan kiai⁷ dan menjadi pusat bagi pembelajaran keagamaan dengan menggunakan sistem yang khas, baik sistem pengajian atau klasikal. Umumnya pesantren memiliki fasilitas asrama bagi santri.⁸

4. Tipologi Pesantren

Para peneliti telah banyak melakukan kajian terhadap pesantren dan membaginya kepada beberapa tipologi. Dalam bukunya tentang tradisi pesantren, Zamakhsyari membagi pesantren menjadi dua tipe yakni *salafi* dan modern. Keduanya memiliki perbedaan berkaitan dengan kurikulum dan sistem pengajaran. Pesantren *salafi*

⁵ <https://kbbi.web.id/reorientasi> diakses pada tanggal 25 Agustus 2022.

⁶ Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren: Suatu Kajian tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren*, (Jakarta: INIS, 1994), 25.

⁷ Mujamil Qomar, *Pesantren Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, (Jakarta: Erlangga, 2007), hlm. 1-20.

⁸ Dawam Raharjo (Ed), *Pergulatan Dunia Pesantren Membangun Dari Bawah*, (Jakarta: P3M, 1985), 99.

memiliki kurikulum 100% ilmu agama yang referensinya berasal dari kitab-kitab kuning dengan sistem pengajaran yang masih tradisional khas pesantren, yakni *sorogan* dan *bandongan*. Sedangkan pesantren modern memiliki kurikulum yang mengintegrasikan ilmu umum dan ilmu agama dengan sistem sekolah, madrasah atau bahkan perguruan tinggi. Sebagian dari pesantren modern tersebut tetap mempertahankan kitab kuning sebagai referensi kurikulumnya, namun sebagian yang lain tidak lagi menggunakannya.⁹

Senada dengan Zamakhshary, Mujammil Qomar membagi tipe pesantren juga kepada dua tipe. Namun sedikit berbeda dengan istilah yang digunakan Zamakhshary, Mujammil Qomar membuat diferensiasi pesantren menjadi pesantren *salafi* dan pesantren *khalafi*. Pesantren *salafi* didefinisikan sebagai pesantren yang tetap mempertahankan karakteristik khasnya sebagai lembaga pendidikan dengan kurikulum tradisional yang berasal dari kajian kitab-kitab kuning. Sedangkan pesantren *khalafi* adalah pesantren yang membuka diri terhadap pengetahuan-pengetahuan di luar ilmu keagamaan, sehingga memasukkan pengetahuan umum dalam kurikulum dan kajian keilmuan yang diadakan.¹⁰

Berdasarkan diferensiasi yang telah disebutkan di atas, penelitian ini lebih condong terhadap definisi yang disampaikan oleh Zamakhshary Dhofier dan Mujammil Qomar. Sebab peneliti melihat bahwa diferensiasi yang dirumuskan oleh keduanya bersifat ringkas namun mencakup keseluruhan tipologi pesantren. Meskipun keduanya memiliki istilah yang agak berbeda ketika menyebutkan tentang tipe pesantren yang menjadi antitesa pesantren *salafi*, namun sejatinya substansi yang ingin disampaikan oleh keduanya memiliki kemiripan.

Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan istilah pesantren *salafi* dan *khalafi* untuk membuat diferensiasi pesantren berdasarkan kurikulum dan sistem. Berdasarkan penggunaan terhadap kedua istilah tersebut, peneliti kemudian mengambil sampel dari masing-masing tipe pesantren tersebut agar mendapatkan pandangan yang tepat mengenai implementasi pendidikan inklusif di pesantren.

5. Implementasi

⁹ Dhofier, *Tradisi Pesantren*, 41-42.

¹⁰ Mujammil Qomar, *Pesantren*, 41.

Kata implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna pelaksanaan atau penerapan.¹¹

6. Nilai Inklusif

Inklusif berasal dari bahasa Inggris *inclusive*. Kata ini memiliki makna sikap terbuka terhadap keberagaman.¹² Secara terminologi, kata inklusif memiliki dua makna. Makna pertama memiliki korelasi dengan keterbukaan sikap terhadap orang yang berkebutuhan khusus. Sedangkan makna kedua memiliki definisi yang lebih luas, yakni berkaitan dengan keterbukaan sikap terhadap keragaman dan perbedaan di kehidupan sosial.

Definisi inklusif dalam konteks pendidikan memiliki definisi sebagai pendidikan mengenai keterbukaan sikap terhadap realita perbedaan yang terjadi dalam kehidupan.¹³ Lebih lanjut, pendidikan agama inklusif menurut Alwi Shihab adalah sebuah bentuk pendidikan agama yang mendasarkan nilai-nilai pengajarannya pada norma-norma yang berkaitan dengan toleransi dan keterbukaan sikap.¹⁴ Pemahaman mengenai toleransi dan keterbukaan sikap ini mencakup seluruh aspek, baik berkaitan dengan keyakinan dan pemahaman keagamaan maupun berkaitan dengan sikap sosial masyarakat.

Penelitian ini memfokuskan pembahasannya dalam pengertian nilai inklusif yang lebih umum, yakni mengenai nilai-nilai yang menuntun seseorang untuk bersikap terbuka, toleran dan menerima perbedaan yang ada. Unsur-unsur nilai inklusif yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai: toleransi, kesetaraan, keseimbangan atau keselarasan, moderasi dan musyawarah. Secara normatif, unsur dari nilai inklusif tersebut digali dari sumber primer Islam, yaitu al-Qur'an dan Hadis. Berikut akan dipaparkan landasan-landasan tekstual mengenai unsur-unsur tersebut:

a. Toleransi

¹¹ <https://kbbi.web.id/implementasi> diakses pada tanggal 14 Agustus 2022.

¹² Scott Lash dan Mike Featherstone (ed.), *Recognition and Difference: Politics, Identity, Multiculture* (London: Sage Publication, 2002), 2-6.

¹³ Anwari Nuril Huda, *Pendidikan Inklusif dari Pesantren*, Jurnal Idrak, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 39

¹⁴ Alwi Shihab, *Islam Inklusi: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, (Bandung: al-Mizan, 1999), 23.

Toleransi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sikap menghargai terhadap pendirian yang berbeda atau bertentangan dengan pendiriannya.¹⁵ Dalam bahasa Arab, toleransi bersinonim dengan kata *tasamuh*. Dalam al-Qur'an, kata *tasamuh* memang tidak tersirat secara eksplisit. Namun, sejatinya ada banyak sekali teks yang membicarakan mengenai toleransi atau *tasamuh*, surat *Yunus* ayat 41 dan *al-Baqarah* ayat 256 misalnya:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam; Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkat kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang teguh kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.¹⁶

Kedua ayat tersebut mewakili terhadap beberapa ayat lain yang membicarakan mengenai nilai toleransi. Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam menjunjung tinggi terhadap sikap menghargai atas *sunnatullah* baik yang berupa perbedaan keyakinan maupun perbedaan pendirian dan sikap.

b. Kesetaraan

Kesetaraan dalam konteks kemanusiaan bermakna sebagai sikap yang memandang setiap individu memiliki hak dan kelas sosial yang sama.¹⁷ Dalam al-Qur'an, pernyataan mengenai konsep kesetaraan ini tertuang dalam surat *al-Hujurat* ayat 13, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.

¹⁵ <https://kbbi.web.id/toleransi> diakses pada tanggal 18 November 2019.

¹⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2018)

¹⁷ William Outhwait (ed.), *Kamus Lengkap Pemikiran Sosial Modern*, (Jakarta: Putra Grafika, 2008), 274.

Artinya: Hai Manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.¹⁸

c. Keseimbangan atau keselarasan

Keseimbangan dalam bahasa Arab sepadan dengan kata *tawazun*. Dalam al-Qur'an anjuran untuk bersikap seimbang ini tertuang dalam beberapa ayat, antara lain dalam surat *al-Hadid* ayat 25:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

Artinya: Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.¹⁹

d. Musyawarah

Kata musyawarah berasal dari bahasa Arab *syura*. Menurut Abdul Hamid al-Anshari, musyawarah adalah sebuah usaha untuk mendiskusikan suatu permasalahan, untuk kemudian mengambil keputusan terbaik terhadap hal tersebut yang tidak merugikan salah satu pihak.²⁰ Dalam al-Qur'an anjuran untuk melakuakn musyawarah tertuang dalam surat *al-Syura* ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya: Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.

¹⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponogoro, 2018)

¹⁹ Ibid.

²⁰ 'Abd al-Hamid Ismail al-Anshary, *Nidham al-Hukmi fi al-Islam*, (Qatar: Dar al-Qatharayin al-Fujah, 1985), 45.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif secara bergantian. Metode kuantitatif deskriptif digunakan untuk memaparkan tingkat implementasi nilai-nilai inklusif pada sistem pendidikan agama di pesantren *salafi* dan *khalafi* di Madura dengan menggunakan teori *Customer Satisfaction Index* (CSI) dan data dikumpulkan menggunakan angket yang diisi oleh civitas akademika dari kedua jenis pesantren. Sedangkan pendekatan kualitatif digunakan untuk memaparkan langkah strategis reorientasi sistem pendidikan agama untuk mewujudkan nilai-nilai inklusif di pesantren *salafi* dan *khalafi* di Madura dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara kepada civitas akademika dari kedua jenis pesantren pesantren dan dokumentasi.

Data kuantitatif yang didapat dari angket diuji keabsahannya menggunakan uji validitas product moment dan uji reliabilitas chronbach's alpha.²¹ Sedangkan pengujian validitas pada data kualitatif menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Adapun pesantren yang akan menjadi objek penelitian adalah Pondok Pesantren Al Furjani Sampang dalam katagori *salafi* dan Pondok Pesantren Nazhatut Thullab Camplong dalam katagori *khalafi*.

Pembahasan

A. Implementasi Nilai Inklusif Pada Sistem Pendidikan Agama di Pesantren Al Furjani dan Pesantren Nazhatut Thullab.

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap implementasi nilai-nilai inklusif di Pondok Pesantren Al-Furjani dan Pesantren Nazhatut Thullab didapatkan hasil sebagai berikut

²¹ Muslich Anshori dan Sri Iswati, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Surabaya, Airlangga University Perss, 2017), 120-121.

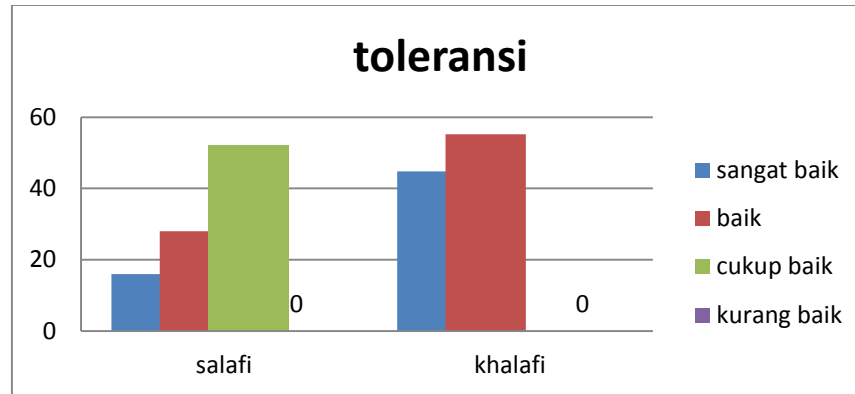


Diagram 1. Tingkat Implementasi Nilai Toleransi

Diketahui bahwa nilai toleransi di pondok *Salafi* yaitu Pondok Pesantren Al-Furjani dalam kategori cukup baik karena 52% atau 14 dari 25 responden memberikan penilaian cukup baik, 28% atau 7 responden menilai baik dan 16% atau 4 responden menilai sangat baik. Sedangkan implementasi nilai toleransi di pondok *khalafi* PP. Nazhatut Thullab dalam katagori baik karena 55.17% atau 16 dari 29 responden menilai baik dan 44.83% atau 13 responden menilai sangat baik.

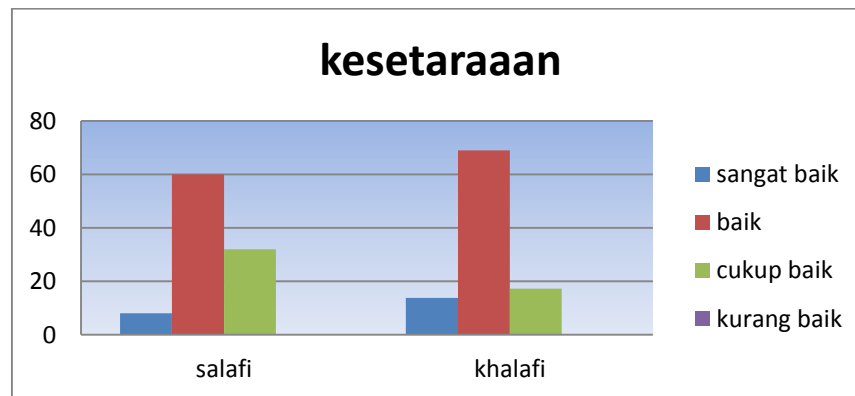


Diagram 2. Tingkat Implementasi Nilai Kesetaraan

Diagram di atas menunjukkan nilai kesetaraan di pondok *salafi* yaitu Pondok Pesantren Al-Furjani dalam kategori baik karena 60% atau 15 dari 25 responden menilai baik, 8% atau 2 responden memberikan penilaian sangat baik dan 32% atau 8 responden menilai cukup baik. Begitu pula implementasi nilai kesetaraan di pondok *khalafi* PP. Nazhatut Thullab dalam katagori baik karena 68.97% atau 20 dari 29 responden menilai baik, 13.8% atau 4 responden menilai sangat baik dan 17,24% atau 5 responden menilai cukup.

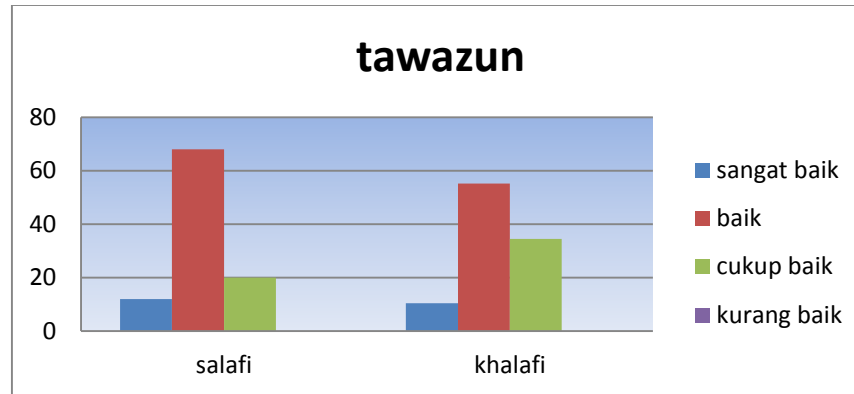


Diagram 3. Tingkat Implementasi Nilai Tawazun

Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa nilai tawazun atau keseimbangan di pondok *salafi* yaitu Pondok Pesantren Al-Furjani dalam kategori baik karena 68% atau 17 dari 25 responden menilai baik, 12% atau 3 responden memberikan penilaian sangat baik dan 20% atau 5 responden menilai cukup baik. Begitu pula implementasi nilai tawazun di pondok khalafi PP. Nazhatut Thullab dalam katagori baik karena 55.17% atau 17 responden menilai baik, 10.34% atau 3 responden memberi penilaian sangat baik dan 34.48% atau 5 responden menilai cukup.

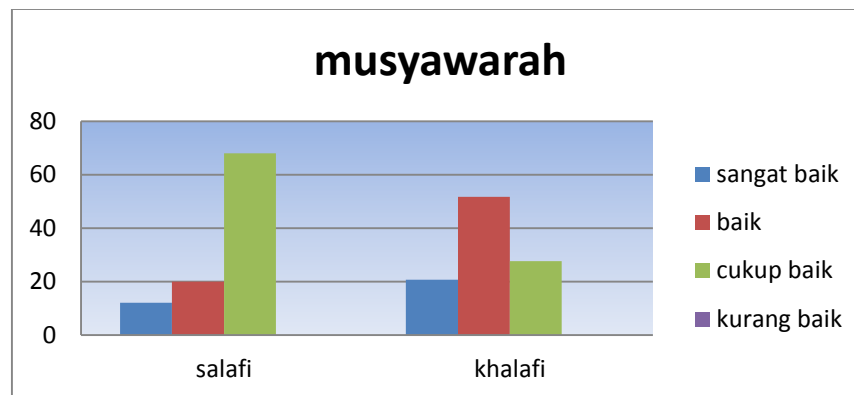


Diagram 4. Tingkat Implementasi Nilai Musyawarah

Diketahui bahwa penerapan musyawarah di pondok *salafi* yaitu Pondok Pesantren Al-Furjani dalam kategori cukup baik karena 68% atau 17 dari 25 responden menilai cukup baik, 20% atau 5 responden memberikan penilaian baik dan 12% atau 3 responden menilai sangat baik. Lain halnya implementasi musyawarah di pondok *khalafi* PP. Nazhatut Thullab dalam

katagori baik karena 51.72% atau 15 responden menilai baik, 27.6% atau 8 responden memberi penilaian cukup baik dan 20.7% atau 6 responden menilai sangat baik.

B. Langkah Strategis Reorientasi Sistem Pendidikan Agama Berbasis Inklusif di Pesantren

Mengingat besarnya peran pesantren pada kultural dan intelektual Nusantara maka menjadi wajib bagi pesantren untuk memiliki system pendidikan yang dapat menopang berbagai kebutuhan masyarakat sebagai pusat peradaban dan pendidikan dalam segala hal termasuk agen transformasi budaya yang mengusung nilai moderasi dan toleransi. Tingginya tingkat radikalisme di Indonesia seharusnya dapat diredam oleh pesantren, bukan justru menjadi pemicu timbulnya radikalisme di masyarakat. Hal ini dilandasakan pada kenyataan bahwa nilai toleransi dalam Islam sudah ditanamkan sejak awal kehadirannya melalui konsep *Islam rahmatan lil 'alamin* yang mengedepankan kedamaian, toleransi, persaudaraan²² sehingga perbedaan yang ada dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat bukanlah permasalahan namun justru anugrah.

Sehingga dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pesantren sebaiknya melakukan reorientasi sekaligus rekonstruksi terhadap sistem pendidikan agama yang selama ini telah berjalan dalam dunia pendidikan pesantren. Civitas pesantren harus mulai memahami bahwa orientasi pendidikan keagamaan tidak hanya harus terfokus pada kemampuan memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai praktis, namun jauh lebih penting adalah pemberian prioritas pada kemampuan pemahaman serta implementasi terhadap nilai-nilai moral dan filosofis pendidikan.

Berdasarkan hasil dari pengukuran tingkat implementasi nilai inklusif di kedua jenis pesantren di atas, diketahui kedua pesantren tidak memiliki perbedaan yang jauh dalam penanaman nilai keterbukaan dalam keberagaman social beragama. Maka berikut reorientasi system pendidikan agama Islam yang dapat dilakukan pada kedua jenis pesantren sebagai berikut :

1. Pendidik

²² Muhammad Nur Jamaluddin, "Wujud Islam *Rahmatan Lil Âlamin* Dalam Kehidupan Berbangsa Di Indonesia", Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan, Vol. 14, No. 2, Desember 2020. hlm. 4

Pendidik dalam proses belajar mengajar memegang peranan sangat penting sebagai alat tercapainya tujuan pendidikan. Apalagi di pesantren, pendidik yang dalam hal ini disebut kiai, ustadz dan ustdzah merupakan sosok teladan bagi santri dengan prinsip *barokah* yang tertanam kuat di dunia pesantren. Kondisi tersebut lahir dari pemahaman bahwa beliau merupakan pribadi dengan kelebihan keilmuan dan kedekatan dengan Allah SWT²³. Dengan posisi strategis inilah maka diperlukan pendidik dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Pendidik yang mampu menelaah teori inklusifisme sehingga memiliki kekayaan pengetahuan mengenai nilai-nilai inklusif dan implementasinya²⁴
- b. Pendidik yang memiliki kemampuan memahami kondisi santri dengan latar belakang yang berbeda baik suku, ras dan budaya
- c. Pendidik yang memiliki paradigma inklusif dengan kemampuan mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai inklusif pada segala aspek kehidupan.

Selain memiliki input pendidik dengan kriteria di atas, juga penting untuk meningkatkan kualitas inklusifme pendidik melalui seminar dan pelatihan seperti yang pernah dilaksanakan oleh Direktorat Pendidikan Agama Islam Kemenag pada tahun 2015. Sebanyak 42 guru dikirim ke Australia untuk mempelajari multikulturalisme.

2. Kurikulum

Kurikulum sebagai landasan proses pembelajaran menjadi poin yang sangat penting dalam menanamkan nilai inklusif dalam pendidikan Islam. Profil lulusan yang ditetapkan oleh pesantren dapat dicapai dengan kurikulum yang menunjang. Sehingga menjadi sangat penting bagi pesantren untuk memiliki kurikulum yang sarat nilai inklusif seperti toleransi, kesetaraan, keseimbangan, dan musyawarah dalam dua konteks inklusif yaitu:

- a. Inklusifisme sesama muslim, yaitu kurikulum yang terbuka terhadap perbedaan madzhab dan golongan dalam Islam. Artinya pembelajaran di pesantren harus memperkenalkan berbagai madzhab dan pendapat ulama yang berbeda-beda dalam memandang permasalahan kehidupan seperti dalam tata cara beribadah, tata cara

²³ Ahmad Fauzi, "Pendidikan Inklusif Berbasis Kearifan Lokal Dalam Praktik Sosial Di Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo Jawa Timur, Proceedings Ancoms 2017, hlm. 720.

²⁴ Dede Rosyada, "Pendidikan Multikultural di Indonesia Sebuah Pandangan Konsepsional".. Jurnal Sosio Didaktika, Vol. 1, No. 1. 2014. hlm.11-12

bermuamalat, dan lain sebagainya. Sehingga santri sebagai output pesantren terbiasa untuk mengkaji dan memutuskan permasalahan dengan berlandaskan pada keterbukaan tersebut serta terbiasa untuk menghormati perbedaan praktik beragama orang lain yang memiliki perbedaan keyakinan.

Tuntutan adanya keterbukaan terhadap sesama muslim ini dilandaskan pada kenyataan bahwa konflik internal agama sama beratnya atau bahkan lebih berat dari konflik eksternal. Sehingga keterbukaan sesama muslim perlu dikembangkan dengan menyusun langkah strategis²⁵ salah satunya melalui penyusunan kurikulum berbasis inklusif ini.

- b. Inklusifisme antar umat beragama, yaitu kurikulum yang terbuka terhadap perbedaan agama yang dianut dengan dilandasi pemahaman rasa kemanusiaan dan persaudaraan. Konteks ini lahir sebagai bentuk kesadaran bahwa manusia hidup dalam kondisi masyarakat yang plural dengan berbagai agama dan budaya. Dimana masing-masing agama memiliki perbedaan kepentingan dan keyakinan sehingga kondisi ini rawan menimbulkan konflik. Al quran mejabarkan konsep *Wasathah*²⁶ atau moderasi beragama dimana agama diartikan dalam bentuk ramah serta jauh dari kesan ekstrim.

Hal ini senada dengan pendapat yang diungkapkan oleh Mustaqim dan Hamid bahwa kurikulum pesantren seharusnya memuat tiga nilai yaitu ukhuwah islamiyah atau ikatan sesama muslim, ukhuwah wathaniyah (persatuan nasional) atau ikatan sesama masyarakat Indonesia dan terakhir yaitu ukhuwah insaniyah (ikatan atas dasar kemanusiaan)²⁷

3. Proses Pendidikan

Sejatinya, sikap inklusif ini sejalan dengan fungsi kultural pesantren di Nusantara, yaitu menjadi alat transformasi budaya guna menciptakan kesadaran sosial yang humanis, toleran dan moderat. Namun pada kenyataannya, nilai-nilai inklusif ini terkadang hanya menjadi norma-norma yang ternarasikan secara tekstual dalam referensi-referensi keislaman, namun ternyata tidak cukup mampu teraplikasikan dalam ruang pendidikan

²⁵ Kementerian Agama RI, Moderasi Beragama, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019) hlm.29

²⁶ Fauziah Nurdin, Moderasi Beragama Menurut Al-Qur'an Dan Hadist, Jurnal Ilmiah Al Mu'ashirah: Vol. 18, No. 1, Januari 2021 Hlm. 59-70

²⁷ Abdul Mustaqim dan M. Luthfi Hamid. Multikulturalisme dalam Bingkai Ukhuwah Islamiyah. (Yogyakarta: Idea Progress Yogyakarta, 2012)

dan kehidupan praktis kemasyarakatan. Padahal, inklusifitas menjadi salah satu sikap kunci untuk menangkal radikalisme yang makin marak di Indonesia.

Oleh karena itu selain poin pendidik dan kurikulum, hal lain yang juga penting dalam usaha tercapainya system pendidikan Islam yang inklusif adalah proses pendidikan yang berlandaskan tiga pilar moderasi yaitu : moderasi pemikiran, gerakan dan perbuatan.

Berikut penjelasan dari masing-masing pilar ²⁸

a. Pilar moderasi pemikiran.

Merupakan proses belajar yang mengutamakan kemampuan santri untuk memadukan teks dan konteks dimana santri diajarkan dan dibiasakan untuk tidak menumpukan pemikiran keagamaan pada teks semata sehingga memaksa agar realitas dan konteks sesuai dengan teks yang dipahami. Selain itu santri juga dibiasakan untuk tidak mengedepankan keterbukaan berlebihan yang justru mengabaikan teks.

b. Pilar moderasi gerakan

Merupakan proses belajar yang memberikan pemahaman kepada santri bahwa gerakan untuk menyebarkan agama Islam dengan tujuan mengajak kepada kebaikan harus menggunakan prinsip kebaikan juga.

c. Pilar moderasi perbuatan

Adalah proses belajar dengan moderasi dalam praktik keagamaan dan tradisi yang ada di masyarakat. Dalam hal ini santri diperkuat kemampuan literasi dan praktik dalam mengkomunikasikan praktik agama dan tradisi setempat. Bahwa agama dan tradisi saling terbuka membangun kebudayaan baru yang masih sesuai dengan norma keIslaman dan sesuai dengan nilai masyarakat.

Ketiga pilar di atas dapat menjadi jalan bagi terwujudnya santri yang inklusif terhadap segala perbedaan yang ditemui di masyarakat.

Kesimpulan

Sebagai usaha mewujudkan peran pesantren sebagai agen transformasi budaya dan intelektual Nusantara yang bersifat inklusif maka menjadi wajib bagi pesantren baik pesantren *salafi* maupun *khalafi* untuk memiliki system pendidikan yang mengusung nilai inklusif yang

²⁸ Kementrian Agama RI, Moderasi Beragama, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI,2019) hlm.29

terdiri dari toleransi, kesetaraan, tawazun dan musyawarah. Berdasarkan hasil analisa tingkat implementasi nilai inklusif di kedua pesantren sebagai berikut : Nilai toleransi di pesantren salafi dalam kategori cukup baik sedangkan pesantren khalafi dalam kategori baik, Nilai kesetaraan dan tawazun (keseimbangan) dalam kategori baik untuk kedua pesantren, dan nilai musyawarah di pesantren salafi dalam kategori cukup baik sedangkan pesantren khalafi dalam kategori baik.

Temuan yang kedua dari penelitian ini adalah reorientasi system pendidikan islam dengan nilai inklusif berfokus pada tiga hal yaitu pendidik, kurikulum dan proses pembelajaran. Dimana pendidik harus memiliki keilmuan dalam bidang inklusif dan kemampuan untuk mengajarkan dan menerapkan nilai inklusif kepada santri. Kemudian pada bagian kurikulum maka kedua pesantren diharapkan menyusun kurikulum yang mengedepankan nilai keterbukaan terhadap sesama muslim dan antar beragama dengan menanamkan nilai toleransi, kesetaraan, tawazun dan musyawarah. Begitu pula pada poin proses pembelajaran maka kedua pesantren diharapkan menggunakan pilar moderasi pemikiran, gerakan dan perbuatan.

Referensi

Anshary (al), Abd al-Hamid Ismail. *Nidham al-Hukmi fi al-Islam*. Qatar: Dar al-Qatharayin al-Fujah, 1985.

Anshori, Muslich&Sri Iswati. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Surabaya, Airlangga University Press, 2017.

Departemen Agama , *Al-Qur"an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponogoro, 2018.

Fauzi, Ahmad. "Pendidikan Inklusif Berbasis Kearifan Lokal Dalam Praktik Sosial Di Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo Jawa Timur, Proceedings Ancoms 2017.

<https://ditpdpontren.kemenag.go.id/pdpp/statistik?id=35>.

<https://kbbi.web.id/reorientasi>.

<https://kbbi.web.id/implementasi>

<https://kbbi.web.id/toleransi>

Huda, Anwari Nuril. *Pendidikan Inklusif dari Pesantren*. Jurnal Idrak. Vol. 1. No. 1, 2018.

- Jamaluddin, Muhammad Nur, "Wujud Islam *Rahmatan Lil Âlamin* Dalam Kehidupan Berbangsa Di Indonesia", Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan, Vol. 14, No. 2, 2020.
- Kementrian Agama RI, Moderasi Beragama, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019) hlm.29
- Khosin, *Tipologi Pondok Pesantren*. Jakarta: Diva Pustaka, 2006.
- Lash, Scott dan Mike Featherstone (ed.). *Recognition and Difference: Politics, Identity, Multiculture*. London: Sage Publication, 2002.
- Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren: Suatu Kajian tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren*. Jakarta: INIS, 1994.
- Mulkhan, Abdul Munir. "*Humanisasi Pendidikan Islam*". Tashwirul Afkar. Jurnal Refleksi Pemikiran Keagamaan dan Kebudayaan. No. 11, 2001
- Mustaqim, Abdul dan M. Luthfi Hamid. *Multikulturalisme dalam Bingkai Ukhuwah Islamiyah*. Yogyakarta: Idea Progress Yogyakarta, 2012.
- Nurdin, Fauziah, ".Moderasi Beragama Menurut Al-Qur'an Dan Hadist, Jurnal Ilmiah Al Mu'ashirah". Vol. 18, No. 1, 2021
- Outhwait, William (ed.). *Kamus Lengkap Pemikiran Sosial Modern*. Jakarta: Putra Grafika, 2008.
- Qomar, Mujamil. *Pesantren Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*. Jakarta: Erlangga, 2007.
- Raharjo, Dawam. (Ed). *Pergulatan Dunia Pesantren Membangun Dari Bawah*. Jakarta: P3M, 1985.
- Rosyada, Dede. "Pendidikan Multikultural di Indonesia Sebuah Pandangan Konsepsional". *Jurnal Sosio Didaktika*", Vol. 1, No. 1. 2014
- Shihab, Alwi. *Islam Inklusi: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*. Bandung: al-Mizan, 1999.